

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam politik modern, partisipasi politik merupakan salah satu masalah yang sangat penting untuk dibicarakan dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan praktik politik di sebuah negara.¹ Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Funny W Mukti mengatakan bahwa pembangunan politik akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan jika masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan bangsa dan negara ke depannya. Oleh karena itu, rendah atau tingginya suatu tindakan dan partisipasi dalam kehidupan politik akan menjadi suatu tanda yang penting terhadap jalannya proses demokrasi serta perwujudan dari kedaulatan rakyat.² Selain itu, Sasha Anggara juga berpendapat bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan salah satu tindakan yang mutlak dari masyarakat dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang yang terbaik bagi dirinya dan kehidupan politiknya adalah orang itu sendiri. Dengan demikian, keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut kehidupan warga negara, maka warga masyarakat berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan dan arah kebijakan yang akan dihasilkan demi kesejahteraan bersama. Keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari.³

Dalam usaha untuk memahami partisipasi politik dalam sistem demokrasi sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai istilah demokrasi itu sendiri. Kata

¹ Gun-Gun Heryanto, dkk., *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 28.

²Funny W Mukti, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Mewujudkan Negara Demokratis”, dalam *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12:2 (Edisi September 2022), hlm. 96.

³ Sasha Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 142.

demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua kata yakni “*demos*” dan “*kratos*”. “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan “*cratein*” atau “*kratos*” yang berarti pemerintah. Maka secara etimologis demokrasi berarti pemerintahan rakyat banyak atau juga bisa diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat.⁴ Oleh karena itu, partisipasi politik dari masyarakat pada umumnya dan kaum muda pada khususnya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan politik dan praktek kehidupan berdemokrasi dalam sistem demokrasi di Indonesia menjadi hal yang sangat urgen. Dengan demikian, partisipasi rakyat menjadi unsur hakiki dari demokrasi atau bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Partisipasi politik yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Mengenai kondisi demokrasi dewasa ini, Firman Noor mengatakan bahwa setelah demikian diharapkan menjadi masa keemasan bagi demokrasi, Era Reformasi akhir-akhir ini justru ditandai dengan beberapa fenomena kemunduran demokrasi. Tidak sedikit pula pengamat dan pemerhati politik Indonesia, terutama dewasa ini, yang menyadari adanya sesuatu yang salah dalam kehidupan demokrasi yang berujung pada stagnansi atau bahkan *setback* dalam kehidupan politik Indonesia.⁵ Fenomena kemunduran itu semakin terlihat jelas dalam hal terkait penegakan hukum dan semakin menguatnya praktik dinasti politik. Mengenai praktek kehidupan berdemokrasi, Diego Fosati dan Ferran Martinez i Comma menulis: “Meski banyak masyarakat Indonesia tetap berkomitmen pada demokrasi sebagai sistem politik, namun masih banyak yang tidak puas dengan bagaimana demokrasi dipraktikkan.”⁶ Ada beberapa pihak baik dari kalangan akademisi, politisi dan warga negara biasa lainnya juga memberi pendapat yang sama terkait kemunduran demokrasi yang

⁴Funny W. Mukti, *op.cit.*, hlm. 97.

⁵Firman Noor, “Partai dan Kemunduran Demokrasi: Identifikasi Penyebab dan Usulan Solusi,” dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiarti dan Herlambang P Wiratraman (ed.), *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia* (Depok: Pustaka LP3ES, 2021), hlm. 134-135.

⁶Diego Fosati dan Ferran Martinez i Comma, “Bagaimana konsepsi publik terhadap demokrasi membentuk dukungan demokratis di Indonesia, dalam Thomas Power dan Eve Warburton, (ed.), *Demokrasi di Indonesia Dari Stagnasi Ke Regresi* (Jakarta: KPG, 2021), hlm. 260.

sedang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini. Seperti penegakan hukum yang dinilai hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, serta kebebasan berpendapat dalam mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan pun tidak diberi ruang yang cukup untuk diekspresikan. Masyarakat yang memegang pandangan demokrasi partisipatoris lebih mungkin puas dengan cara kerja demokrasi, sementara mereka yang memandang demokrasi dalam istilah liberal-egalitarian cenderung tidak merasa puas. Oleh karena itu, mengenai partisipasi politik masyarakat akhir-akhir ini, secara eksplisit, Mariam Budiardjo menulis: “Dalam analisis politik modern, partisipasi dalam kehidupan politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini, banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca-industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action*.⁷

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson sebagaimana yang dikutip oleh Mariam Budiardjo, “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual dan kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif”.⁸ Lebih lanjut, untuk menerangkan konsep terkait partisipasi politik di negara yang menganut paham demokrasi, Mariam Budiardjo mengatakan bahwa di negara-negara demokrasi konsep mengenai tindakan atau partisipasi politik berangkat dari pemahaman bahwa kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat, yang tentunya dilaksanakan

⁷Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 367.

⁸*Ibid.*, hlm. 368.

melalui kegiatan bersama demi menetapkan arah dan tujuan serta masa depan masyarakat itu sendiri dan juga dalam usaha untuk memilih atau menentukan orang-orang yang memegang tampuk pemimpin. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.⁹ Bayu Putro Wibowo mengatakan bahwa *check and balance* terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai seorang wakil rakyat merupakan sebuah tindakan dari partisipasi politik itu sendiri. Partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga sipil yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.¹⁰

Terkait partisipasi politik dalam pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintahan, Yosef Keladu Koten menulis demikian: “Dalam konteks ini, partisipasi politik dipahami sebagai bagaimana warga negara mengambil bagian dalam aktivitas-aktivitas publik, seperti mengatur urusan komunitas, dan bagaimana pemerintahan seharusnya dibentuk dan kekuasaan politik dilaksanakan.”¹¹ Oleh karena itu, hal yang paling signifikan tentang politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pembentukan identitas kolektif. Pemerintahan dilaksanakan dalam pembuatan keputusan administratif dalam *assembli*, yang melibatkan semua warga negara untuk turut berpartisipasi didalamnya. Maka, secara jelas Yosef Keladu Koten, menegaskan bahwa “Politik merupakan instrumen bagi warga masyarakat untuk berintegrasi dalam negara dan selanjutnya berpartisipasi di dalamnya.”¹²

Keterlibatan dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi sangat dibutuhkan. Mengenai cara hidup partisipatif, Yosef Keladu Koten menulis demikian: “Atas dasar ini, Aristoteles mengadvokasi cara hidup partisipatif, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik lewat mengambil bagian dalam memerintah dan

⁹*Ibid.*

¹⁰ Bayu Putro Wibowo, “Partisipasi Politik Dalam Demokrasi Di Era Digital” (Skripsi, Universitas Negeri, Jakarta, 2017), hlm. 18.

¹¹Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2010), hlm. 6.

¹²*Ibid.*, hlm. 7.

diperintah, karena semua warga negara adalah bebas dan sederajat.”¹³ Dan sebagai sebuah negara yang memiliki kebebasan dalam kehidupan berdemokrasi, maka segala keputusan politis dan kebijakan umum kembali kepada rakyat. Karena jika keputusan dan kebijakan yang dihasilkan mampu memberi kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, maka demokrasi dianggap berhasil dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat banyak.

Terkait partisipasi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia, Bayu Putro Wibowo mengatakan bahwa peran warga negara menjadi sentral dalam kaitannya dengan setiap kebijakan yang dibuat, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengambil bagian dalam kebijakan politik. Hak warga negara untuk dapat berkontribusi didalam kenegaraan seperti memberikan aspirasi serta menuntut adanya perubahan melalui mekanisme pembuatan petisi menjadi tindakan yang legal di mata hukum.¹⁴ Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kebebasan berbicara, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat diberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi hal yang sangat penting, terutama terkait partisipasi dalam kehidupan berpolitik, agar sistem demokrasi yang sedang dibangun bisa berjalan menuju suatu arah yang lebih baik dan semakin demokratis. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan, pembangunan dan pembuatan aturan atau hukum baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan.¹⁵ Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik yang memiliki jabatan publik ataupun masyarakat sipil, memiliki hak atau setidaknya rasa tanggung jawab yang sama dalam menentukan arah kebijakan politik demi kesejahteraan dan kebaikan hidup bersama.

¹³*Ibid.*, hlm. 134-135.

¹⁴Bayu Putro Wibowo, *op. cit.*, hlm. 2.

¹⁵Funny W Mukti, *op. cit.*, hlm. 94.

Salah satu elemen penting dalam masyarakat demokratis adalah orang muda atau kaum muda. Sulit membayangkan jika sebuah negara demokratis tanpa adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari kaum muda. Tentang keterlibatan aktif dalam kehidupan berdemokrasi Yosef Keladu Koten mengatakan bahwa, “Demokrasi sejatinya mengandaikan keterlibatan aktif warga negara dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari proses pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.”¹⁶ Dalam konteks ini, maka sangat diharapkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari kaum muda untuk terus menjaga esensi dari demokrasi serta merawat keberlangsungan kehidupan politik dalam sistem demokrasi di Indonesia yang merupakan sebuah keharusan. Pada satu sisi, partisipasi politik itu menunjukkan adanya keadilan rakyat dan pada sisi lain, partisipasi politik mencerminkan pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Partisipasi menjadi tolok ukur kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Makin tinggi dan bermutu tingkat partisipasi makin baik tata politik dan makin demokratis kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu partisipasi mutlak dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.¹⁷ Warga negara pada umumnya dan kaum muda pada khususnya, dituntut untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dengan mengandalkan rasionalitas dan sikap kritis, agar demokrasi Indonesia tetap terjaga dengan baik dan semakin berkualitas.

Kaum muda adalah tonggak penting dalam perjalanan sejarah suatu bangsa. Kaum muda juga menjadi generasi yang menentukan masa depan bagi sebuah bangsa. Pola pikir kaum muda menolong terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dari berbagai aspek. Beberapa peran penting kaum muda adalah ikut serta dalam pencaturan bidang politik, berperan juga dalam bidang sosial-kemasyarakatan, terlibat dalam bidang sosial-ekonomi dan juga ikut serta dalam mengkritisi kebijakan atau keputusan serta aturan dan juga hukum yang dibuat oleh para pemerintah, sehingga peran penting kaum muda dalam kehidupan politik dan

¹⁶Yosef Keladu Koten, *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁷ Yakobus Dere Beoang, *Korelasi Antara Kualitas Pemimpin Politik Dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih: Suatu Telaah Dari Perspektif Keteladanan Yesus* (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2014), hlm. 1.

partisipasi aktif dalam politik menjadi urgen. Kaum muda selalu mempunyai peran penting dan terus mencari ruang-ruang dimana mereka dapat berdialog dan berdiskusi dan bukan ruang yang disediakan pemerintah. Ketika para pemuda mengkomunikasikan gagasannya dalam ruang yang mereka inginkan, pada dasarnya mereka meminta pemerintah untuk mendengar dan memahami pandangan mereka. Inilah yang dimaksud dengan *disconnect democracy*, dimana ada selalu jarak antara konsep partisipasi yang diinginkan pemerintah dan pemuda atau kaum muda. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan peran serta kaum muda dalam menentukan kemajuan bangsa yang beradab. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah bangsa Indonesia. Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 menjadi salah satu peristiwa sejarah yang menjadi bukti nyata keterlibatan dan partisipasi kaum muda dalam bidang politik.¹⁸ Fakta historis ini mempertegas peran penting kaum muda dalam usaha untuk mematahkan rezim pemerintahan represif dan non-demokratis di Indonesia.

Gerakan kaum muda di Indonesia telah menunjukkan kemajuan pesat dalam membangun bangsa ini menjadi suatu bangsa yang baik dengan melepaskan diri dari berbagai bentuk penjajahan. Gerakan kaum muda itu di Indonesia dimulai sejak era prakemerdekaan sampai pada era Reformasi.¹⁹ Namun, perjuangan kaum muda di Indonesia harus terus berlanjut untuk menata kehidupan politik menjadi lebih baik di tengah gempuran arus globalisasi yang kian hari semakin tinggi.

Namun, setelah gerakan 1998, kaum muda mengalami defisit partisipasi politik progresif.²⁰ Apalagi, agenda demokratisasi yang kembali dilucuti semangatnya dalam reformasi 1998 tidak kunjung membawa hasil. Maka, muncul pula semacam sikap pesimisme kaum muda untuk terlibat secara aktif dalam ranah politik. Problematika partisipasi politik kaum muda menjadi santer didiskusikan lantaran saat ini absensi kaum muda dalam banyak model pencaturan politik hampir pasti pada

¹⁸Servasius Rovin Asak, "Partisipasi Politik Kaum Muda Di Indonesia" (Skripsi, STFK Ledalero, Maumere, 2019), hlm. 1.

¹⁹Doni Koli dkk., "Kaum Muda dalam Kekacauan Politik: Menggagas Solusi Menepis Keengganan Berpolitik Kaum Muda", *Jurnal Ledalero*, X:I (Ledalero: Agustus-Desember 2016), hlm. 2.

²⁰*Ibid.*, hlm. 91.

titik nadir.²¹ Fenomena terkait keengganan berpolitik kaum muda memang pantas untuk dibicarakan. Pembicaraan terkait partisipasi politik tidak bisa dilepaskan dari negara yang menganut sistem demokrasi dan juga dari kaum muda dalam kehidupan politiknya.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis berusaha mendalamai urgensi partisipasi politik kaum muda untuk menjaga keberlangsungan kehidupan politik dalam sistem demokrasi di Indonesia. Tulisan ini disajikan di bawah judul “**Urgensi Partisipasi Politik Kaum Muda dalam Menjaga Keberlangsungan Demokratisasi di Indonesia**”. Perhatian pada kerentanan dalam demokrasi Indonesia tidak membuat warga negara mengecilkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai melainkan lebih untuk memberikan harapan bagi berlanjutnya daya lenting demokrasi Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan baru.²²

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki dua (2) rumusan masalah, yakni rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah secara umum di sini yakni: Apa urgensi partisipasi politik kaum muda dalam menjaga keberlangsungan demokratisasi di Indonesia? Sementara itu, rumusan masalah khusus yaitu Apa hubungan demokrasi dengan partisipasi politik? Siapa itu kaum muda dalam kehidupan demokrasi? Mengapa partisipasi politik kaum muda menjadi penting dalam keberlangsungan demokratisasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki dua (2) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Mengacu pada perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali lebih dalam

²¹*Ibid.*, hlm. 93.

²² Thomas Power dan Eve Warburton, *op.cit.*, hlm. 58.

pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik kaum muda dalam menjaga keberlangsungan demokratisasi di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga akan menguraikan konsep tentang kaum muda secara umum dan juga sebagai generasi penerus bangsa yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Lebih lanjut, skripsi ini juga bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang hal-hal konseptual dan defenitif terkait partisipasi politik, kaum muda dalam kehidupan politik dan partisipasi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia, agar semakin baik serta semakin demokratis.

1.3.2 Tujuan Khusus

Pertama, secara khusus tulisan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman penulis tentang urgensi partisipasi politik kaum muda dalam menjaga keberlangsungan demokratisasi di Indonesia. Secara teoretis, tulisan ini dapat menjadi referensi dalam memahami arti penting partisipasi kaum muda dalam kehidupan politik dalam sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, secara praktis, skripsi ini merupakan sebuah ajakan bagi publik secara khusus kaum muda untuk menyadari pentingnya kerja sama yang baik dalam membangun bangsa Indonesia agar tetap harmonis dan mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Kalangan pemerintahan dan kaum muda dapat menjalin kerja sama yang baik, agar cita-cita bangsa yang diimpikan dapat diwujudkan dan kehidupan demokrasi pun semakin demokratis.

Kedua, tujuan tulisan ini sangat berguna bagi kaum muda pada umumnya dan khususnya bagi kaum muda yang terlibat aktif dalam dunia politik, agar lebih memahami esensi mereka sebagai agen perubahan bangsa dan mampu mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin demokratis dan selalu berpikir kritis dalam mengawasi dan mengkritisi segala macam aturan atau kebijakan yang dibuat oleh para penguasa atau pemerintah demi kesejahteraan masyarakat banyak.

Akhirnya, skripsi ini sangat berguna bagi penulis sendiri untuk memahami bagaimana pentingnya partisipasi politik kaum muda dalam menjaga keberlangsungan demokratisasi di Indonesia dan sebagai latihan dalam mengembangkan pola pikir kritis, logis dan pola ilmiah akademis. Selain memahami

tema penulisan ini, tentunya tujuan sederhana dari penulis adalah untuk memenuhi tuntutan formil dalam rangka meraih gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero-Maumere.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan literatur-literatur yang berkorelasi dengan tema ini. Berbagai informasi dicari dari buku, kamus, ensiklopedi, jurnal ilmiah, skripsi, manuskrip, juga beberapa sumber dari internet untuk mendukung penulisan skripsi ini. Informasi yang diperoleh dielaborasi sedemikian rupa sehingga menjadi satu karya ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab *Pertama*, pendahuluan. Dalam bab ini, penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, manfaat dan signifikansi tulisan dan sistematika penulisan. Bab *kedua*, penulis membahas dan mendalami konsep tentang partisipasi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Bab *ketiga*, penulis memaparkan konsep tentang kaum muda dalam politik di Indonesia. Bab *keempat*, penulis mencoba menggali lebih dalam tentang urgensi partisipasi politik kaum muda dalam menjaga keberlangsungan demokratisasi di Indonesia. Bab *kelima*, merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan umum dan saran yang berkaitan dengan seluruh skripsi ini. Skripsi ini ditutup dengan Bibliografi.